

ABSTRAK

Bermunculan Ormas lokal di Bali tidak dapat terlepas dari faktor politik dan ekonomi, kenangan pahit masa lalu saat peristiwa pembantaian PKI tahun 1965-1966 berdampak pada memudarnya pedoman kehidupan masyarakat Bali untuk menjaga perdamaian antar sesama *krama* Bali. Melalui “Pariwisata Budaya” kekuasaan sentralistik mengubah masyarakat Bali semakin terlena hingga melupakan fiksi historis sebagai produk kalkulasi politis dan tujuan-tujuan politis konservatif. Rezim reformasi telah memberikan kesempatan masyarakat Bali untuk pencarian kembali identitas diri, dimana masyarakat membentuk suatu kelompok untuk mendorong terwujudnya politik identitas Bali. Berdasarkan hal tersebut, fokus penelitian ini pada latar belakang Ormas dalam membangun relasi kekuasaan melalui politik identitas sekaligus mengetahui pola hubungan politik identitas dalam pertarungan Ormas lokal di Kota Denpasar tahun 2017. Sebagai kerangka teori penulis menggunakan model karakteristik politik identitas Von Beyme dan Arthur Miller dengan pendekatan fundamentalisme Thomas Meyer untuk melakukan analisis. Penelitian menggunakan metode kualitatif yang dinilai paling sesuai dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan data dokumen. Pemeriksaan keabsahan melalui triangulasi data dengan sumber, untuk kemudian dilakukan pengecekan kembali suatu informasi yang diperoleh melalui perbandingan waktu dan alat yang berbeda, hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, dan perspektif seseorang maupun dokumen. Hasil penelitian menunjukkan latar belakang ormas membangun relasi kekuasaan melalui politik identitas, antara lain: (1) ekspresi ketidaksetujuan untuk melawan subordinasi marginalisasi ekonomi dan sosial, (2) meningkatkan eksistensi Ormas sebagai ikatan etnis dan kelompok dalam melakukan perekrutan anggota, (3) terwujudnya legalitas Ormas lokal karena dinilai mendorong implementasi gerakan pemerintah untuk meng-*Ajegkan* Bali, (4) membangun relasi sosial untuk mobilisasi secara ideologis dalam upaya mendapatkan kekuasaan politik, (5) Ormas menjadi kelompok tandingan melawan kebijakan pemerintah yang dirasa tidak sesuai dengan budaya lokal Bali. Pola hubungan Ormas lokal di Bali erat kaitannya dengan identitas etnis, sehingga menciptakan *bargaining position* yang dimanfaatkan baik sebagai persaingan dalam perebutan sumber daya untuk memenuhi kesejahteraan ekonomi maupun meraih kekuasaan politik.

Kata Kunci : *Politik, Identitas, Ormas*

ABSTRACT

The emergence of local mass organizations in Bali cannot be separated from political and economic factors, the bitter memories in the past during the PKI massacres in 1965-66 impacted on the fading of the guidelines of life of Balinese people to maintain peace among fellow manners of Bali. Through “Cultural Tourism” centralized power change Balinese people to increasingly forgetting historical fiction as a product of political calculations and conservative political goals. Regime of reformation has given the chance for Balinese people to search for identity where people form a group to encourage the realization of identity politics of Bali. Based on the background explained before, the focus of this study is the background of mass organizations in building power relations through identity politics also to find out the pattern of identity political relationships in the battle of local mass organizations in Denpasar in 2017. As a theoretical framework, the writer used the model of identity political characteristics of Von Beyme and Arthur Miller with fundamentalism approach of Thomas Meyer to conduct the analysis. This study used qualitative method which is considered suitable with the data collection through observation, interviews, and document data. The validity checks through triangulation of data with the sources, to then to be checked again an information obtained through the comparison of time and different tools, observation results with the data results of the interview, and one’s perspective or document. The results of the study shows that the background of mass organizations in building power relations through identity politics, among others: (1) expression of disagreement to fight against subordination of social and economic marginalization, (2) increase the existence of mass organizations as a bond of ethnic and group in recruiting members, (3) the realization of the legality of local mass organizations because it is considered encouraging the implementation of government movement to regulate Bali, (4) build social relation for mobilization ideologically in the efforts to seize political power, (5) mass organizations become equal group in fighting the government policy which is considered not suitable with the local culture of Bali. The relationship patterns of local mass organizations in Bali is closely related to the ethnic identity so that it creates a good bargaining position as a competition in the battle for resource to meet the economic welfare or seize the political power.

Keywords: Politics, identity, mass organizations.